

RENJA

TAHUN 2025



RENJA

BAGIAN ORGANISASI

RENJA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Maha Esa, yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 adalah implementasi dari amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancangan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 –2025.

Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026, Rencana Kerja OPD (Renja) adalah dokumen Perancangan pembangunan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rancangan Strategis yang menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah selama kurun waktu 4 (empat) Tahun yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan memperhatikan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi.

Rencana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada hakikatnya adalah merupakan komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus), dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masadepan.

Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan ini semoga dapat dijadikan sebagai arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi semua Pegawai di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya masing-masing.

Salakan,

2025

KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN



HERMANTO MARUN, SP., MP
Pembina
NIP. 197709302007011012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DATAR TABEL	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Sistimatika Penulisan	4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN AWAL BAGIAN ORGANISASI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Organisasi	9
2.3. Isu-isu Penting Pelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	13
2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir Bagian Organisasi.....	13
2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	18
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bagian Organisasi	18
3.3. Program dan Kegiatan	20

BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

Hal		
Tabel1	Pengukuran Kinerja Bag. Bagian Organisasi Tahun 2023	7
Tabel 2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Peangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	8
Tabel 3	Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bag. Bagian Organisasi Setda Kab. Banggai Kepulauan	14
Tabel 4	Review terhadap Racangan Akhir RKPD Tahun 2025 Kab. Banggai Kepulauan	19
Tabel 5	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025 Kab. Banggai Kepulauan.....	28

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah diberikan wewenang seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri serta mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini maka terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah, dari sistem top-down (dari atas ke bawah) sekarang botton –up (dari bawah ketas). Artinya, era otonomi daerah ini maka kepentingan masyarakatlah yang menajdi prioritas utama. Untuk itu diperlukan tata kelola tata pemerintahan yang baik yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efesien partisipatif, transparan dan akuntabel.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan Masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Di dalamnya juga mengatur tentang peranan dan tanggungjawab Kepala OPD untuk menyusun RANWAL OPD.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, Dan Ranwal Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Ranwal Perangkat Daerah terdiri dari enam tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan Rencana Awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan tahap penetapan. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Ranwal perangkat daerah yang definitif.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026, RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan sudah disusun dan ditetapkan sehingga RKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, materi Rakornis Kementerian/ lembaga

dan Pemerintah Daerah dalam mendukung RKP Tahun 2024, berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM kedua.

Selanjutnya Ranwal Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Ranwal dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RENJA Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 adalah :

1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagai Mana telah diubah beberapa kali Terkait dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Ranwal pemerintahan daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas penyelenggaraan perda Nomor 12 Tahun 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas penyelenggaraan perda Nomor 12 Tahun 2017;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Ranwal pemerintahan daerah ;
14. Permendagri Nomor 54 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
15. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Permendagri Nomor 22 tahun 2018 tentang penyusunan Ranwal Pemerintah Daerah Tahun 2019;
17. Peraturan Daerah kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2008 No 17);
18. Peraturan Daerah kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) Sebagaimana Telah di Ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Menjadi pedoman dalam melaksanakan program/ kegiatan selama 1 tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra serta mejadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

b. Tujuan

- Menciptakan kepastian dan sinergritas perencanaan program kegiatan, perumusan kegiatan teknis, penyelenggaraan urusan pemerinthan dan pelayanan publik, pengawasan, pengendalian serta pelayanan publik serta penguatan lemabaga Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengarahkan program dan kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada renstra serta memberikan masukan bagi perencanaan yang lebih tinggi.

1.3 Sistematika Penulisan

Renja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Landasan hukum
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Sistematika penulisan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Ranwal Perangkat Daerah Tahun Lalu

- a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Organisasi tahun lalu dan capaian renstra Bagian Organisasi;
- b. Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Organisasi
- c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- d. Review Terhadap Ranwal Pembangunan Daerah
- e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

- a. Telaahan terhadap kebijakan nasional
- b. Tujuan dan sasaran Ranwal perangkat daerah
- c. Program dan kegiatan

Bab IV Ranwal dan pendanaan perangkat daerah

Bab V Penutup

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Organisasi Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan Ranwal Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025, sangat diperlukan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana tahun 2024, untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sampai tahun terakhir yang diselaraskan dengan kegiatan pada tahun berjalan. Hal ini akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan yang diikuti dengan program, kegiatan serta penganggaran.

Berdasarkan Rencana Strategis Bagian Organisasi Tahun 2022-2026, Bagian Organsasi Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki tujuan yang akan dicapai adalah:

- a. Menciptakan lembaga perangkat daerah yang efektif dan efisien
- b. Menciptakan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang tepat
- c. Menciptakan prosedur kerja
- d. Meningkatkan pembinaan pendayagunaan aparatur

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Bagian Organisasi sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2024 melaksanakan 1 urusan, 4 Kegiatan, dan 10 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Bahan Logistik
- b. Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan
- c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan bahan komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa umum kantor

3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau kendaran dinas jabatan
- 4. Penataan Organisasi
 - a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - b. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Pengukuran kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan sasaran- sasaran dan capaian sasaran sebagaimana pada table berikut :

Tabel .1
Pengukuran Kinerja Bagian Organisasi Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
Terciptanya Lembaga Organsasi Perangkat Daerah	Tertatannya Kelembagaan perangkat daerah	100%	90%
Terciptanya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang tepat	Terciptanya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang tepat	100%	95%
Teciptanya Prosedur Kerja dan Pelayanan Publik yang Prima Dan Berkualitas	Teciptanya Prosedur Kerja dan Pelayanan Publik yang Prima Dan Berkualitas	100%	95%
Terciptanya Kualitas dan Kesejahteraan Aparatur	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih	100%	95%

Jumlah anggaran kegiatan pada DPA Perubahan Bagian Organsasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 setelah Perubahan sebesar **Rp.817.716.500,00**, dengan jumlah realisasi anggaran kegiatan tahun 2023 untuk belanja langsung sebesar **Rp. 800.826.701-** atau sebesar **97,93 %**.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Ranwal perangkat daerah dan pencapaian renstra Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL 2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Ranwal Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama Perangkat Daerah :
Bagian Organisasi

Lembar :

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Ranwal Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Ranwal Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Ranwal Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7 / 6)	9	10=(5+7)	11 = (10/4)
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
				SEKRETARIAT DAERAH									
4	03			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran								
			1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah materai/ surat menyurat yang direncanakan	4880	700	560	560	100%	700	1260	30%
			2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang direncanakan	30	5	5	5	100%	5	10	40%

			6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah pajak kendaraan dinas/ operasional yang dibayarkan	10	2	1	1	100%	1	3	38%
			10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah alat tulis kantor yang direncanakan	204	29	35	29	83%	35	58	33%
2				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik								
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15	0	3	0	0%	3	0	0%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	46	0	16	0	0%	10	0	0%
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	2	2	2	100%	12	4	7%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	6	6	6	100%	12	12	20%
3				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tertatanya Pelaksanaan Jam Kerja	60	0	12		0%	12	0	0%
5				Penataan Organisasi	Persentase capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur								
			3	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Bimbinagn Tkenis yang di ikuti	134	15	15	15	100%	29	30	22%
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah SPM yang di ikuti	58	0	10	0	0%	13	0	0%
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi BirokrasiBirokrasi	Jumlah Diklat Formal yang diikuti	91	0	15	0	0%	20	0	0%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bagia Organisasi Setda Kabupaten Banggai Kepulauan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terdiri dari :

- 1. Pejabat Eselon III : Kepala Bagian
- 2. Pejabat Eselon IV : sebanyak 3 Personil terdiri dari :
 - a. Kapala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - b. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - c. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- 3. Staf sebanyak 2 (dua) personil ;
- 4. Tenaga Honorer sebanyak 5 orang personil

Sedangkan berdasarkan golongan /ruang dan tingkat pendidikan, maka keadaan sumber daya manusia Bagian Organisasi Setda kabupaten Banggai Kepulauan dapat digambarkan sebagai berikut;

NO.	Eselon	Golongan/ Ruang									
		IV	III	II	PPPK	TKD	SMP	SMA	DIII	S1	S2
1	III	1									1
2	IV		3							2	1
3	Staf		1		5	5		2	1	7	
JUMLAH		1	4		5	5		2	1	10	2
					15		15				

Berdasarkan tabel kepegawaian di atas, maka dilihat dari sisi sumber daya manusia Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banggai Kepulauan masih dapat dikatakan cukup baik dalam tingkat pendidikan. Namun demikian kemampuan operasional akan tetap di kembangkan melalui jalur pendidikan fomrmar guna lebih meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur pemerintah khususnya pada Bagian Organisasi.

.

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran

kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolak ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian Organisasi Setda Kab. Banggai Kepulauan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2026 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2	5	5		1	1	1	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1	1	1		4	4	4	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				35	35	35		8	8	13	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2	35	35		10000	10000	10000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2	2	2		2	2	2	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-	30		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3	3	3					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				16	10	10		14	-	6	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2	12	12	-	11	10	8	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				6	12	12		18	11	9	
	Penerapan Penggunaan Seragam Dinas dan Atributnya				7	7	7	-				
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				1	1	1		1	1	1	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1	1	1	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-	15	4	4					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10				4	4	4	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15							
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4	29	29					
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					13	13					
						20	20					
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				35	35	35					
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				10	10	10					
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				7	7	7					
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				15	10	10					
	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik				1	1	1					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah				4	4	4					

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bagian Organisasi adalah sebagai Berikut :

1. Pemamfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan bidang tugas organisasi untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Dengan adanya otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk melakukan penataan kelembagaan, peningkatan sumber daya aparatur penyediaan kebutuhan pegawai serta meningkatkan pelayanan publik.;

2. Pelayanan Prima dalam bidang pelayanan publik.

Sebagai unsur Sekretariat Daerah yang membantu Sekretaris Daerah dalam bidang pelayanan publik, maka sudah tentu Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan harus berorientasi pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani Instansi terkait. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan bagi pihak yang terkait dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banggai Kepulauan;

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Banggai Kepulauan. Keberadaan Aparatur merupakan unsur penting dalam setiap pengelolaan pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan bidang kelembagaan, sumber daya aparatur dan ketatalaksanaan. Oleh karenanya peningkatan kapasitas merupakan sebuah ikhtiar untuk melaksanakan standar operasional prosedur dalam bidang kelembagaan, sumber aparatur dan ketatalaksanaan;

2.4. Review Terhadap Ranwal Pembangunan Daerah

Pencapaian program/kegiatan terhadap Rencana Kerja RKPD sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan dari Bagian Organisasi. Setiap program/kegiatan yang dilaksanakan selalu dievaluasi apakah program/kegiatan yang dilaksanakan tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dari tahun ke tahun kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan tidak mengalami perubahan hal tersebut dikarenakan Bagian Organisasi berperan sebagai supporting staf. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2022 guna mendukung target dan sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama Perangkat Daerah : Bagian Organisasi

Lembaran Dari

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bag. Org.	Jumlah Logistik yang dibutuhkan	3 jenis	47.585.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bag. Org.	Jumlah Logistik yang dibutuhkan	3 jenis	49.836.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bag. Org.	Jumlah Cetak dan Penggandaan yang di gunakan	2 Jenis	11.011.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bag. Org.	Jumlah Cetak dan Penggandaan yang di gunakan	2 Jenis	16.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bag. Org.	Jumlah Media yang direncanakan	2 media	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bag. Org.	Jumlah Media yang direncanakan	2 media	7.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bag. Org.	Jumlah Peserta Perjalanan Dinas yang direncanakan	12 OT	71.410.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bag. Org.	Jumlah Peserta Perjalanan Dinas yang direncanakan	12 OT	71.410.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bag. Org.	Jumlah Materai yang digunakan	600	3.000.0000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bag. Org.	Jumlah Materai yang digunakan	600	7.200.0000	
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Bag. Org.	Jumlah jasa komunikasi Sumber daya listirk yang digunakan	2 unit	50.000.000	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Bag. Org.	Jumlah jasa komunikasi Sumber daya listirk yang digunakan	2 unit	50.000.000	

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bag. Org.	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	11.760.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bag. Org.	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	11.760.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bag. Org.	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	14 jenis	245.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bag. Org.	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	14 jenis	245.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bag. Org.	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara	8	Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bag. Org.	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara	8	Unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bag. Org.	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara	1	Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bag. Org.	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara	1	Unit	
	Penataan Organisasi					Program peningkatan disiplin aparatur					
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bag. Org.	Tersusnya Dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	91.000.000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bag. Org.	Tersusnya Dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	91.000.000	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bag. Org.	Terciptanya Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 jenis	90.000.000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bag. Org.	Terciptanya Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 jenis	90.000.000	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bag. Org.	Tersusnya Reformasi Birokrasi dan SAKIP	1 jenis	100.000.000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bag. Org.	Tersusnya Reformasi Birokrasi dan SAKIP	1 jenis	100.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan Ranwal pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan sampai Musrenbang tingkat Kabupaten. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan Ranwal PD. Penyusunan rancangan Ranwal dibahas dalam forum OPD berkoordinasi dengan Bappeda & Litbang. Tujuan pembahasan rancangan Ranwal adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tupoksi PD. Bagian Organisasi tidak terdapat usulan Musrenbang hal tersebut dikarenakan Bagian Organisasi berperan sebagai supporting staf.

Tabel 5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Banggai Kepulauan

Nama SKPD : Bagian Organisasi

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

BAB III

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Visi pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan “terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang maju, mandiri, bermatabat dan berkeadilan Sejahtera”

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, perlu diimplementasikan melalui tujuh misi Pembangunan Nasional, yaitu:

- a. Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih, berwibawa, dan inovatif
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat.
- c. Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang lestari.
- d. Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat.
- e. Mengembangkan sarana kebutuhan petani dan nelayan yang cukup memadai.
- f. Penyediaan rumah layak huni bagi warga miskin, tunjangan hari tua dan santunan kematian bagi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Ranwal Bagian Organisasi

Tujuan Bagian Organisasi :

1. Tertatanya kelembagaan perangkat daerah;
2. Terciptanya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang tepat;
3. Terciptanya prosedur kerja dan pelayanan publik yang prima dan berkualitas
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan undang- undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan sehingga program kegiatan di Bappeda dan Litbang mendukung ketiga arah kebijakan diatas sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Bagian Organisasi, tujuan dan sasaran Renja Bagian Organisasi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja sasaran				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Menciptakan Lembaga Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien	Terciptanya Lembaga Perangkat Daerah	Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
	Menciptakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang Tepat	Terciptanya a Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang tepat	Terciptanya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang tepat	100%	100%	100%	100%	100%
	Menciptakan Prosedur Kerja	Teciptanya Prosedur Kerja dan Pelayanan Publik yang Prima Dan Berkualita s	Teciptanya Prosedur Kerja dan Pelayanan Publik yang Prima Dan Berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatkan Pembinaan Pendayagunaan Aparatur	Terciptany a Kualitas dan Kesejateran Aparatur	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih	100%	100%	100%	100%	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program/kegiatan Bagian Organisasi mempunyai Program Kerja pada tahun 2025 Berikut adalah Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada bagian perumusan program dan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

TABLE 5

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran SubKegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					SumberDana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)			Tolok Ukur	Target	
					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
					SEKRETARIAT DAERAH										1.163.000.0001.397.540.000			
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										1.163.000.0001.397.540.000			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										20.000.00030.000.000			
					Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah		Jumlah Dokumen yang Tersusun			4 dokumen		20.000.000	Dana Transfer Umum-DanaAlokasi Umum				30.000.000	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										100.000.000100.000.000			
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Pegawai yang Melaksanakan Pelatihan			7 Pegawai		100.000.000	Dana Transfer Umum-DanaAlokasi Umum				100.000.000	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah										180.000.000170.000.000			
					Penyediaan BahanLogistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan			3 Paket		60.000.000	Dana Transfer Umum-DanaAlokasi Umum				50.000.000	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			3 Paket		17.000.000	Dana Transfer Umum-DanaAlokasi Umum				17.000.000	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undanganyang Disediakan			12 Dokumen		3.000.000	Dana Transfer Umum-DanaAlokasi Umum				3.000.000	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD			15 Laporan		100.000.000	Dana Transfer Umum-DanaAlokasi Umum				100.000.000	
4	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										233.000.000233.000.000			
4	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa SuratMenyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat			600 Laporan		3.000.000	Dana Transfer Umum-DanaAlokasi Umum				3.000.000	
4	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			10 Laporan		30.000.000	Dana Transfer Umum-DanaAlokasi Umum				30.000.000	
4	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantoryang Disediakan			24 Laporan		200.000.000					200.000.000	

4	01	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								30.000.000					30.000.000
4	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			8 Unit		30.000.000	Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum			30.000.000	
4	01	01	2,13	Penataan Organisasi								600.000.000					600.000.000
4	01	01	2,13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			3 Dokumen		150.000.000	Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum			150.000.000	
4	01	01	2,13	02	Fasilitasi Pelayanan Publikdan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publikdan Tata Laksana			2 Laporan		150.000.000	Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum			150.000.000	
4	01	01	2,13	03	Peningkatan Kinerja danReformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja danReformasi Birokrasi			6 Dokumen		300.000.000	Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum			300.000.000	
TOTAL												1.163.000.000					1.397.540.000

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan komitmen seluruh personil Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Banggai Kepulauan yang disusun berdasarkan Renstra yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangkang Menengah Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan. Keberhasilan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kebersamaan, kontribusi dan komitmen yang kuat dari seluruh personil. Ranwal Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Banggai Kepulauan, merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2022-2026 merupakan pedoman bagi Bagian Organisasi dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) Bagian Organisasi Tahun 2022-2026 selanjutnya dijabarkan dalam Renja tahun 2025.

Terwujudnya program dan kegiatan tersebut tentu tidak lepas dari komponen pendukung antara lain:

1. Ketersediaan anggaran yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan kegiatan satuannya;
2. Adanya pemahaman manfaat dan fungsi kerjasama dari satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dengan kuantitas yang memadai serta berwawasankedepan;

Demikian Renja ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan yang merupakan Program Kerja Bupati Banggai Kepulauan periode 2022-2026.

Salakan, 2025

Plt. KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN


HERMANTO MARUN, SP., MP
Pembina
NIP. 197709302007011012